

**PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA
TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (Studi Kasus pada Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat
Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik**



Oleh:

LENNIZA ALFIKA DEWI

NIM. 07011381924201

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
MARET 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (Studi
Kasus pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera
Selatan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat
Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik**

Oleh:

LENNIZA ALFIKA DEWI

NIM. 07011381924201

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 18 Februari 2023

Pembimbing

Dr. Alamsyah, S.IP., M.Si

NIP. 197808182009121002



Mengetahui,

Ketua Jurusan



Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINAH (STUDI KASUS
PADA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN)**

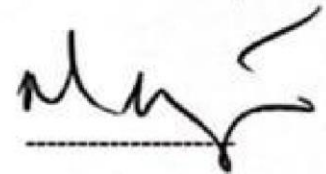
Skripsi
Oleh :
Lenniza Alfika Dewi
07011381924201

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 01 Maret 2023

Pembimbing :

1. Dr. Alamsyah, S.IP., M.Si
NIP. 198801272019031005

Tanda Tangan



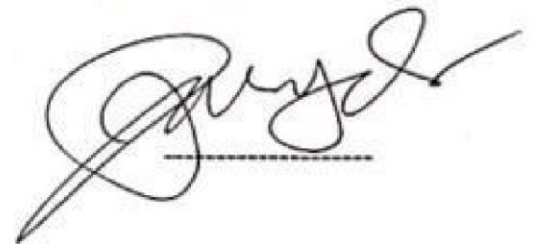
Penguji :

1. Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

Tanda Tangan



2. Januar Eko Aryansyah, S.IP., S.H., M.Si
NIP. 198801272019031005



Mengetahui,



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lenniza Alfika Dewi

NIM : 07011381924201

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan)" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan

Palembang, 4 Maret 2023



Lenniza Alfika Dewi

NIM. 07011381924201

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Qs Al-Baqarah : 286)

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua Orang Tuaku, Ayahanda
Alfiardi dan Ibunda Sri Dewi.
2. Adik-Adikku, Rifki Alfiandri,
Fadhil Alfiansyah, dan David
Aldiansyah.
3. Pacarku, Ahmat Sholihin.
4. Keluarga, Sahabat, dan Teman-
Temanku.
5. Almamaterku.

ABSTRAK

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Jenis penelitian ini adalah asosiatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang diperoleh dari kuesioner, dokumentasi, dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan *software* SPSS versi 24. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pegawai yang diambil 38 sampel dengan teknik sampel random sederhana. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa anggaran berbasis kinerja tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, umur tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kata kunci: *anggaran berbasis kinerja, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.*

PEMBIMBING



Dr. Alamsyah, S.IP., M.Si


NIP. 197808182009121002

Palembang, 18 Maret 2023

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya



Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

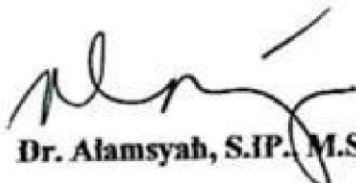
NIP. 196911101994011001

ABSTRACT

Problem of this research was how the influence of budgeting performance based toward performance accountability of governmental institution in Legal Bureau of the Regional Secretariat of South Sumatra Province. The purpose of this study was to determine the influence of budgeting performance based toward performance accountability of governmental institution in Legal Bureau of the Regional Secretariat of South Sumatra Province. The type of research was associative. The data used in this study were primary and secondary data obtained from questionnaires, documentation, and interviews. Data were analyzed using double linear regression with SPSS version 24. The population in this study was all employes and 38 were selected as samples by using simple random sampling technique. The results of this study indicated that the budgeting performance based not significantly affected on performance accountability of governmental institution, age not significantly affected on performance accountability of governmental institution, and level of education significantly affected on performance accountability of governmental institution.

Keywords: *budgeting performance based, performance accountability of governmental institution.*

ADVISOR



Dr. Alamsyah, S.IP., M.Si

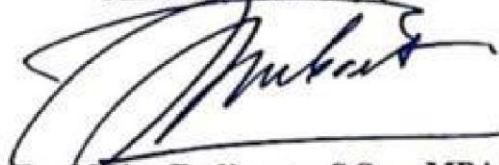
NIP. 197808182009121002

Palembang, 18 March 2023

Chairman of the Department of Public Administration

Faculty Social and Political Science

University of Sriwijaya



Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan)” sebagai persyaratan untuk mendapat gelar Sarjana Administrasi Publik.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada orang tua tercinta yaitu Ayahanda Alfiardi dan Ibunda Sri Dewi yang telah mendidik, mendoakan, membiayai, menemani dan memberikan semangat kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Alamsyah, S.IP., M.Si sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, semangat, dan saran-saran dengan ikhlas dan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu disampaikan juga terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan tak lupa juga penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

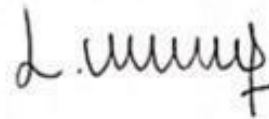
1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, IPU selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

4. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Pemimpin dan staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Semua pihak yang telah ikut membantu dalam menyusun skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, 18 Februari 2023

Penulis



Lenniza Alfika Dewi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Praktis.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Kebijakan Fiskal	9
2.1.2 <i>New Public Service</i> (NPS)	12
2.1.3 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	14
2.1.4 Anggaran	15
2.1.5 Anggaran Berbasis Kinerja	15
2.1.6 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	19
2.2 Teori dan Konsep yang Digunakan	22
2.2.1 Anggaran Berbasis Kinerja	22
2.2.2 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	23

2.3 Penelitian Terdahulu	25
2.4 Kerangka Pemikiran	29
2.5 Pengembangan Hipotesis	30
2.5.1 Relasi Anggaran Berbasis Kinerja (X1) dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y).....	30
2.5.2 Relasi Umur (X2) dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	31
2.5.3 Relasi Tingkat Pendidikan (X3) dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Jenis Penelitian	33
3.2 Operasionalisasi Variabel.....	33
3.3 Hubungan Antar Variabel	37
3.4 Unit Analisis Data	37
3.5 Jenis dan Sumber Data	37
3.5.1 Jenis Data	37
3.5.2 Sumber Data	38
3.6 Populasi dan Sampel	38
3.6.1 Populasi	38
3.6.2 Sampel	39
3.7 Teknik Pengumpulan Data	41
3.8 Teknik Analisis Data	41
3.8.1 Uji Validitas	42
3.8.2 Uji Reliabilitas	43
3.8.3 Uji Asumsi Klasik.....	44
3.8.4 Regresi Linear Berganda	46
3.8.5 Koefisien Determinasi (<i>Adjusted R Square</i>)	46
3.8.6 Uji Hipotesis	47
3.9 Sistematika Penulisan	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	50
4.1 Gambaran Umum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan	50
4.1.1 Profil Umum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan	50
4.1.2 Lokasi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan	51

4.1.3	Visi dan Misi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan	51
4.1.4	Struktur Organisasi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan	53
4.1.5	Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Biro Hukum Sekretariat DaerahmProvinsi Sumatera Selatan	54
4.2	Hasil Pengolahan Data.....	60
4.2.1	Analisis Deskriptif Variabel Penelitian	60
4.2.2	Hasil Pengujian Data	67
4.3	Hasil Penelitian	73
4.4	Pembahasan	75
BAB V SIMPULAN DAN SARAN		77
5.1	Simpulan	77
5.2	Saran	78
DAFTAR PUSTAKA		80
LAMPIRAN		84

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Anggaran dan Realisasi Belanja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 dan 2021.....	5
Tabel 2	Target dan Realisasi Program-Program Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 dan 2021.....	6
Tabel 3	Penelitian Terdahulu.....	26
Tabel 4	Operasionalisasi Variabel.....	34
Tabel 5	Daftar Populasi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	38
Tabel 6	Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Variabel Anggaran Berbasis Kinerja (X).....	60
Tabel 7	Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Variabel Anggaran Berbasis Kinerja (X).....	61
Tabel 8	Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Variabel Anggaran Berbasis Kinerja (X).....	62
Tabel 9	Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Variabel Anggaran Berbasis Kinerja (X).....	63
Tabel 10	Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y).....	64
Tabel 11	Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y).....	64
Tabel 12	Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y).....	65
Tabel 13	Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y).....	66
Tabel 14	Uji Validitas Skor Jawaban Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) dan Anggaran Berbasis Kinerja (X1).....	67
Tabel 15	Variabel Anggaran Berbasis Kinerja (X) dan Akuntabilitas Kinerja	

	Instansi Pemerintah (Y).....	68
Tabel 16	Hasil Uji Normalitas Data.....	69
Tabel 17	Hasil Pengujian Autokorelasi.....	71
Tabel 18	Hasil Regresi Linear Berganda.....	71
Tabel 19	Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	72
Tabel 20	Hasil Uji t (Hipotesis).....	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Skema Kerangka Pemikiran.....	30
Gambar 2 Hubungan Variabel Penelitian.....	37
Gambar 3 Bagan Struktur Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	54
Gambar 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	70

DAFTAR SINGKATAN

AKIP	: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
DKK	: Dan Kawan-Kawan
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DW	: <i>DarbinWatson</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
Kab	: Kabupaten
Kabag	: Kepala Bagian
KUA	: Kebijakan Umum Anggaran
LAN	: Lembaga Administrasi Negara
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
No.	: Nomor
NPS	: <i>New Public Service</i>
OLS	: <i>OrdinaryLeastSquare</i>
PBB	: Pelayanan Publik Baru
PDB	: Produk Domestik Bruto
Permendagri	: Peraturan Kementerian Dalam Negeri
Perpres	: Peraturan Presiden
RANHAM	: Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
RKA-SKPD	: Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
SAKIP	: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SPSS	: <i>Statistical Program Science</i>
TPB	: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
TUN	: Tata Usaha Negara

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) ialah mempertahankan peningkatan kesejahteraan ekonominya masyarakat dengan berkelanjutan, melindungi kelangsungan kehidupan sosialnya masyarakat, mempertahankan mutu lingkungannya maupun pembangunan yang inklusif, serta terselenggaranya tatanan kelola yang dapat mempertahankan peningkatan mutu hidup generasi ke generasinya.

Dilihat dari relevansi terhadap penggunaan pada organisasi sektor publik terutama bidang keuangan, pencapaian pilar ekonominya dari program SDGs dapat diprediksi. Pilarnya ekonomi program SDGs dianggap selaku media pengukuran terhadap berbagai indikatornya seperti pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, hidup sehat serta sejahtera. Maka, penelitiannya ini menerapkan pencapaian pilar ekonomi SDGs selaku tujuannya terhadap implementasi konsep terhadap pembuatan anggaran berbasis kinerjanya Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka mampu menaikkan stabilitas maupun keberlanjutannya kehidupan masyarakatnya. Penelitiannya ini berharap bisa memberi ide inovatif dalam menyusun anggaran kinerjanya Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang dinilai dapat mendorong pencapaian pilar ekonomi SDGs.

Perubahan yang sangat mendasar dalam keadaan sosial, ekonomi maupun politik membutuhkan sistem perencanaan yang komprehensif yang merujuk pada transparansi, akuntabilitas, demokratisasi, desentralisasi, serta partisipasinya masyarakat. Perubahannya ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan serta alokasi sumber keuangan yang kian langka menjadi lebih efisien, efektif maupun berkesinambungan.

Penganggaran diperlukan guna mendistribusikan sumber pendanaan secara lebih efektif serta efisien, serta merupakan tahapan ataupun teknik pembuatan anggaran. Penganggaran adalah tahapan penetapan keseluruhan alokasi dana teruntuk setiap program serta kegiatan di satuan moneternya.

Dengan dukungan aktif perumusan anggaran serta pelaksana tingkat maupun bawah, anggaran dapat berhasil direalisasikan, kondisi berikut terkait korelasi diantara manusia pada pelaksanaan aktivitasnya. Anggaran ialah media manajemen yang bertindak selaku perencanaan serta kontrol, dan penganggaran adalah tahap pembuatan anggaran, yakni semenjak tahapan persiapan yang dibutuhkan sebelum memulai perencanaan, mengumpulkan beragam data serta informasi yang dibutuhkan, membagi tugas perencanaan, mengembangkan perencanaan, menyusun rencana, penerapannya, hingga pemeriksaan maupun penilaian hasil pelaksanaannya.

Menurut Mardiasmo (2009), ``Anggaran ialah perkiraan pernyataan pekerjaan yang dinyatakan dalam bentuk keuangan selama periode waktu tertentu, dan penganggaran ialah tahapan ataupun cara penyusunan anggaran serta peralatan perencanaan maupun pengendalian, serta berguna selaku alat akuntabilitasnya publik berdasarkan pengelolaan dana publik maupun penyelenggaraan program yang didanai publik. Implementasi anggaran perlu bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan penggunaan dana publiknya. Jadi bisa didapatkan cerminan

kinerjanya lembaga yang berkaitan terhadap implementasi dananya publik, serta dapat dipertanggungjawabkan lewat laporan media yang dilakukan selama satu tahun anggarannya” (hal.61)

Implementasi anggaran kinerja dimuat pada Permendagri No.13 Tahun 2006 serta diganti dengan Permendagri No.59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Di peraturan berikut, dikatakan terkait pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Melalui RKA-SKPD berikut artinya sudah tercukupinya keperluan terkait anggaran kinerja serta akuntabilitasnya. Dimana penganggaran berbasis kinerja membutuhkan hasil yang maksimal ataupun pengeluarannya yang dialokasikan, maka tiap pengeluarannya perlu bertumpu ataupun sifatnya ekonomis, efisien, serta efektif.

Siklus anggaran pertama di sektor publik ialah tahapan mempersiapkan anggaran. Di tahapan penganggaran, perkiraan pengeluaran dibuat berdasarkan perkiraan pendapatan yang ada. Kedua, yakni tahapan ratifikasi, ditahapan berikut integritas serta kesiapan mentalnya yang besar melalui eksekutif sangat pentinglah ditahap berikut, Dikarenakan di tahapan berikut pimpinan eksekutifnya wajib mampu menjawabkan semua pertanyaan yang masuk akal serta bantahannya pihak legislatif. Ketiga, yakni tahapan penerapan anggaran. Ditahap beriku, hal terpenting yang perlu dipahami manajer keuangan ialah memiliki sistem (informasi) akuntansi maupun pengendalian manajemennya.

Terakhir, yakni tahapan pelaporan maupun penilaian. Tahapan pelaporan serta penilaian berhubungan terhadap aspek akuntabilitasnya. Apabila ditahap implementasinya didukung sistem akuntansi serta pengendalian manajemennya yang baik, jadi diharapkan tahapan *budget reporting & evaluation* tak mendapatkan banyak permasalahan.

Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014, akuntabilitas kinerja mengacu pada program serta aktivitas yang ditugaskan pemangku kepentingan untuk mewujudkan misi organisasinya secara terukur dengan tujuan/sasaran tertentu lewat laporan kinerja instansinya secara berkala, serta merupakan perwujudan kewajiban instansi guna mempertanggungjawabkan berhasil atau tidaknya suatu kegiatan.

Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003, implementasi pembuatan sistem akuntabilitas kerjanya instansi dilaksanakan melalui pembuatan rencana strategis serta kinerja, pengukuran kerjanya, serta pelaporannya. Disistem AKIP berikut mengacu pada pengukuran kerjanya yang mencakup anggaran berbasis kinerja guna mengidentifikasi capaian kinerja program terhadap visi serta misinya instansi pemerintah. Keluaran utamanya SAKIP ialah Laporan Akuntabilitas Kinerja. Lapornya tersebut sangatlah penting dipergunakan selaku umpan balik kepada penyelenggaranya. Laporan Akuntabilitas Kinerja mencakup informasi yang signifikan dengan pemakai lapornya yakni pejabat ataupun pimpinan eksekutif, unsur pengawasan beserta perencanaan.

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan ialah unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta selaku staf yang bertugas melayani administrasi terhadap implementasi tugasnya pemerintahan daerah serta mempersiapkan materi koordinasi penyusunan kebijakan dalam rangka pelaksanaan tugas maupun fungsinya perangkat daerah dibidang hukum, peraturan perundang-undangan serta HAM.

Guna mewujudkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang tepat, Biro Hukum Sekretariat Daerah melaksanakan program dan kegiatan yang terdapat di Biro Hukum dengan target dan realisasi yang diharapkan.

Adapun targetnya serta realisasinya anggaran belanja yang didapatkan Biro

Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan:

Tabel 1
Anggaran dan Realisasi Belanja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 dan 2021

Tahun	Anggaran	Realisasi	Realisasi	
			Target (%)	Capaian (%)
2020	1.652.262.500	1.171.054.241	100	70,88
2021	2.191.726.000	1.980.594.115	100	90,37

Sumber: Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Sesuai datanya tersebut, bisa ditarik simpulan yakni meskipun realisasi anggaran tahun 2021 meningkat sebesar 19,49% dibandingkan tahun 2020, namun realisasi alokasi anggaran tahun 2020 serta 2021 masih jauh dari targetnya. Hal berikut menjelaskan bahwa pembuatan anggaran belanja daerah belum selaras terhadap aturan yang ada serta menunjukkan beberapa program ataupun kegiatannya belum terwujud. Kondisi berikut terlihat dari pelaporan program dan aktivitas yang dilakukan ditahun 2020 serta 2021.

Tabel 2
Target dan Realisasi Program-Program Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 dan 2021

No.	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2020		2021	
		Target Capaian Program (%)	Realisasi Kinerja Program (%)	Target Capaian Program (%)	Realisasi Kinerja Program (%)
1	Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, Lebih Tinggi dan Keserasian Antar Peraturan Perundang-undangan Daerah	100	58,18	100	98,29
2	Penyusunan Himpunan Peraturan dan Penyebaran Informasi Hukum dan Dokumentasi Hukum	100	95,50	100	99,84
3	Penyelesaian Perkara yang Menyangkut Kepentingan Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	100	98,85	100	98,53
4	Penyuluhan Hukum	100	93,47	100	92,31
5	Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan Daerah Melalui Media Cetak	100	-	100	99,98
6	Penelitian dan Penelaahan Draf Keputusan Gubernur Sumsel	100	90,16	100	99,20
7	Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma Kepada Masyarakat Miskin	-	-	-	-
8	Pemantauan dan Evaluasi Pengendalian Program RANHAM dan Koordinasi Pelaksanaan HAM	100	65,34	100	65,24
9	Pembinaan dan Pengembangan Sistem Informasi Hukum di Provinsi Sumatera Selatan	100	87,12	100	99,93
10	Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Hukum tentang Perdata, Pidana dan TUN (Tata Usaha Negara)	100	43,69	100	41,30
11	Rapat Koordinasi dengan Kabag Hukum dan Sekretaris DPRD Kab/Kota	100	89,69	100	88,28
12	Peraturan Daerah	100	73,58	100	89,53
13	Peraturan Gubernur	100	57,48	100	95,46

Total	92,31	70,88	92,31	90,37
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Sumber: Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Berdasar datanya tersebut, bisa diketahui bahwasannya penerapan program ditahun 2021 mengalami peningkatan senilai 19,49%. Namun, terdapat 5 program yang menurun ditahun 2021 yakni Penyelesaian Perkara yang Menyangkut Kepentingan Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan turun sebesar 0,32%, Penyuluhan Hukum turun sebesar 1,16%, Pemantauan dan Evaluasi Pengendalian Program RANHAM dan Koordinasi Pelaksanaan HAM turun sebesar 0,1%, Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Hukum tentang Perdata, Pidana serta TUN (Tata Usaha Negara) turun sebesar 2,39% dan Rapat Koordinasi dengan Kabag Hukum dan Sekretaris DPRD Kab/Kota turun sebesar 1,41%. Kendati demikian, menurut Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah berusaha secara maksimal serta sukses menyelenggarakan program maupun aktivitas sejalan rencananya yang sudah ditentukan. Maka, akuntabilitasnya kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sudah dapat dipertanggungjawabkan.

Beberapa penelitian terdahulunya menunjukkan anggaran berbasis kinerja berdampak pada akuntabilitas kinerjanya lembaga pemerintah (Junery & Norhanisah, 2018; Wardani & Silvia, 2021; Anggraeni & Saleh, 2020; Suharnoko, 2019; Priatna & Nuraisyah, 2018; Hermanto, 2020; Fauziah, 2021; Safitri, 2022; Wahjono, 2013). Tetapi sebagian lain menyatakan tak ada dampak anggaran berbasis kinerja pada akuntabilitas kinerjanya lembaga pemerintah (Ferniyanti, Suratno, & Supriyadi, 2019). Sehubungan dengan perdebatan ilmiah ini, peneliti berusaha berkontribusi dalam perdebatan ini dengan cara meneliti relasi dua variabel ini di Kota Palembang.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai latar belakangnya yang sudah disampaikan, sehingga rumusan masalahnya ialah bagaimana pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasar rumusan masalahnya yang sudah disampaikan, sehingga tujuannya ialah mengetahui pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas instansi pemerintah pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasilnya penelitiannya berikut berharap bisa sebagai pedoman tambahan, beserta sebagai referensi ataupun kajian terhadap penelitian berikutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Menginformasikan beserta memberi masukan terhadap pegawai Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan terkait pengaruh anggaran berbasis kinerja pada akuntabilitas kerjanya instansi pemerintah dan sebagai pertimbangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan guna mengoptimalkan akuntabilitas kerjanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Edisi Ke-3*. Jakarta: Erlangga.
- Bawono, A. H. (2018). *Pengelolaan Keuangan Negara-Daerah : Hukum, Kerugian Negara, Dan Badan Pemeriksa Keuangan*. Yogyakarta: UPPSTIM YKPN.
- Fauziah. (2021). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Pertanggungjawaban Belanja Terhadap Kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Pegawai Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Medan. *Jurnal Institusi Politeknik Ganessa Medan*, 166-171.
- Hasan, I. (2010). *Pokok-Pokok Materi Statistik 2 (Statistik Inferensi) Edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Haspiarti. (2012). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Pemerintahan Kota Parepare). Skripsi Tidak Diterbitkan. Makassar: Jurusan Akuntansi, Universitas Hasanudin. (online).
- Hermanto, C. B. (2020). Pengaruh Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring Dan Evaluasi, Dan Pertanggungjawaban Anggaran Dengan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). *Akrab Juara*, 40-56.
- Hertianti, D. N. (2010). *Akuntansi Sektor Publik (Edisi 2)*. Jakarta: Salemba Empat.

- Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (2003). Lembaga
Administrasi Negara.
- Komang, dkk. (2014). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kehutanan UPT KPH
Bali Tengah Kota Singaraja. (*Jurnal Akuntansi*), (online), Vol 2, No. 1.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit ANDI.
- Muhammad Junery, N. (2018). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap
Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis). *Jurnal Akuntansi Syariah*,
142-150.
- Ningrum Ferniyanti, S. E. (2019). Analisis Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja
Dan Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja Dan Evaluasi Pelaporan
Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Studi Kasus Pada Badan Karantina Pertanian).
Jurnal Ekobisman, 27-39.
- Nordiawan, D. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Cetakan Kelima. Penerbit Salemba
Empat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (2007). Menteri Dalam Negeri.
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (2014). Presiden Republik IndonesiaP.

- Prasetia Bahri, S. (2012). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Instansi Pemerintah (Studi Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon). Skripsi Tidak Diterbitkan. Bandung: Program Studi Akuntansi, Universitas Pasundan Bandung. (online).
- Priatna & Nuraisyah. (2018). Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Pemerintahan Desa Se-Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut. (Jurnal Ilmiah Akuntansi), (online), Vol 9, No. 1.
- Program Strata Satu. (2022). Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Skripsi. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Saleh, F. A. (2020). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung). *Indonesian Accounting Research Journal*, 36 - 44.
- Santoso, B. (2015). Keagenan (*Agency*): Prinsip-Prinsip Dasar, Teori, dan Problematika Hukum Keagenan. Penerbit Ghalia.
- Safitri. 2022. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektivitas Realisasi Anggaran Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. (Jurnal Inovasi Penelitian), (online), Vol 2, No. 12.
- Singgih, S. (2012). Mengolah Data Statistik Secara Profesional. Penerbit Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. (2010). Statistika Untuk Penelitian. Penerbit CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Bisnis. Penerbit CV. Alfabeta.

- Suharnoko. (2019). Efektivitas Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Malang. (Jurnal Pembangunan dan Inovasi), (online), Vol 1, No. 2.
- Sujarweni, W. (2014). Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi. Penerbit Pustaka Baru Press.
- Wahjono. (2013). Pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kediri), (online), Vol 2, No. 2.
- Wardani & Silvia. (2021). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Lampung. (Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsuraya), (online), Vol 6, No. 1.